



EKSISTENSI SENI PERTUNJUKAN MELALUI PENYEDIAAN RUANG EKSPRESI

EXISTENCE OF PERFORMING ARTS THROUGH THE PROVISION OF SPACE FOR EXPRESSION

**Arif Sofianto¹, Okki Chandra Ambarwati¹, Lita Febrian¹, Sri Sunami¹,
Moch. Lukluil Maknun², Dyah Susilawati²**

¹Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

²Badan Riset dan Inovasi Nasional

Korespondensi: email: brida@jatengprov.go.id

Abstrak

Ruang ekspresi (fisik maupun non fisik) merupakan salah satu strategi penting dalam pemajuan kebudayaan, terutama seni pertunjukan tradisional. Naskah ini menyajikan tiga hal utama, yakni melihat kondisi ruang ekspresi budaya, melihat peranan ruang ekspresi budaya terhadap eksistensi seni pertunjukan tradisional, dan melihat peranan ruang ekspresi budaya terhadap ekonomi masyarakat. Kondisi kesenian Temuan lapangan menunjukkan adanya keragaman kondisi ruang ekspresi budaya di Jawa Tengah, baik pada aspek komitmen pemerintah daerah, dukungan sumber daya, dan aspek ketersediaan ruang ekspresi. Kondisi keragaman tersebut tercermin pada kondisi infrastruktur dan kebijakan di masing-masing daerah. Pada umumnya penyediaan ruang ekspresi bergantung pada pemerintah dan swadaya masyarakat, keterlibatan swasta masih terbatas. Keberadaan ruang ekspresi berperan erat dengan eksistensi seni pertunjukan tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan seni, keberadaan pelaku seni, dan keberadaan penikmat seni di sekitar ruang ekspresi. Ruang ekspresi kesenian tradisional lokal bergantung pada inisiasi masyarakat pada acara atau ritual adat. Penciptaan ruang ekspresi oleh pemerintah daerah berupa penyelenggaraan festival dan acara budaya secara rutin, selaras dengan upaya untuk menjaga eksistensi seni pertunjukan tradisional untuk dapat dinikmati oleh publik. Keberadaan ruang ekspresi budaya berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan penciptaan peluang lapangan kerja dan peningkatan minat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi di sekitar ruang ekspresi, meskipun belum cukup meningkatkan pendapatan seniman terutama seniman komunitas. Naskah ini merekomendasi penambahan ruang ekspresi yang inklusif dan berkelanjutan agar berdampak pada peningkatan ekonomi dan eksistensi seni. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan ruang ekspresi sosial media untuk menjangkau masyarakat secara luas dan mendokumentasikan pertunjukan secara digital.

Kata Kunci: budaya, Jawa Tengah, pertunjukan, ruang ekspresi, seni

Abstract

Expression spaces (physical and non-physical) is an important strategy in the advancement of culture, especially traditional performing arts. This paper presents three main points: examining the condition of spaces for cultural expression, examining the role of spaces for cultural expression in the existence of traditional performing arts, and examining the role of spaces for cultural expression in the community's economy. Conditions of the Arts Field findings indicate a diversity in the condition of spaces for cultural expression in Central Java, both in terms of local government commitment, resource support, and the availability of spaces

for expression. This diversity is reflected in the infrastructure and policies in each region. In general, the provision of spaces for expression depends on government and community self-reliance; private sector involvement is still limited. The existence of spaces for expression plays a close role in the existence of traditional performing arts. This can be seen from the existence of art, the presence of artists, and the presence of art lovers around the spaces for expression. Spaces for expression of local traditional arts depend on community initiation at traditional events or rituals. The creation of spaces for expression by local governments in the form of regular festivals and cultural events, in line with efforts to maintain the existence of traditional performing arts for public enjoyment. The existence of spaces for cultural expression contributes to the community's economy at large. This is demonstrated by the creation of job opportunities and increased public interest in economic activities around spaces of expression, although this has not yet significantly increased the income of artists, especially community artists. This paper recommends the addition of inclusive and sustainable spaces of expression to impact the economy and the existence of the arts. Local governments should utilize social media spaces of expression to reach a wider audience and digitally document performances.

Keywords: art, Central Java, culture, performance, space for expression

PENDAHULUAN

Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu misi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kebudayaan mengalami tantangan di tengah globalisasi, maka diperlukan kemampuan beradaptasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan mengamanatkan upaya penting dalam pemajuan kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan adalah kesenian sebagai sarana menuangkan ekspresi rasa keindahan dan nilai yang divisualkan melalui berbagai macam media dan menjadi bagian kehidupan masyarakat (Mastra, 2021; Murni et. al., 2016; Sinaga et al., 2021; Murni et. al., 2016; Irhandayaningsih, 2018; Irianto, 2017; Yuliza, 2020; Waluyo dan Rosmawati, 2021; Solehah et al, 2022).

J. Maquet mengelompokkan seni berdasar tujuan pembuatannya menjadi *Art by Destination yang* dihasilkan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri dan *Art of Acculturation* dihasilkan oleh masyarakat untuk masyarakat di luar penghasil seni; *pseudo traditional art*; *art by metamorphosis*; *tourism art* (Maquet, 1971). Berdasar dukungan penyelenggaraannya, seni pertunjukan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: *government support* (dukungan pemerintah), *communal support* (dukungan masyarakat), dan *commercial support* (dukungan komersial) (Brandon, 1967).

Kesenian pertunjukan pada awalnya lahir dari ritual, kemudian berkembang menjadi ekspresi estetik dan komunikasi masyarakat, edukasi, hiburan, dan kritik atas permasalahan sosial (Irianto, 2017; Waluyo dan Rosmawati, 2021; Djelantik, 1998; Kayam, 2000; Suharti, 2013;

Sujarno et al., 2003; Santosa et al., 2013). Fungsi seni pertunjukan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis (tontonan) (Soedarsono, 1985).

Pementasan seni pertunjukan tradisional ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari non-komersial yang sering diinisiasi atau didukung oleh pemerintah (*Government Support*) atau komunitas (*Communal Support*) hingga pementasan komersial (*Commercial Support*) yang bersifat mandiri. Klasifikasi pertunjukan seni berdasarkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraannya yang mencakup *government support*, *communal support*, dan *commercial support* (Brandon, 1971).

Kesenian tradisional dapat terus eksis dan hidup apabila ditopang oleh keberadaan sejumlah unsur, yaitu seniman yang kreatif, karya seni yang berkualitas, kritikus seni yang berbobot, dan masyarakat pendukung yang apresiatif (Puguh dan Utama, 2018; Fitiriasari, 2019). Seni pertunjukan apabila tidak dipentaskan dapat hilang seiring waktu (Soedarsono, 2003; Khutniah dan Iryanti, 2012; Irianto, 2016).

Menurut Wadiyo et al. (2012), konsep pelestarian seni tradisi, setidaknya bisa dicakup dalam tiga hal, yakni: 1) upaya mempertahankan keaslian; 2) mengembangkan, dan 3) menyebarluaskan ke masyarakat. Pelestarian dan eksistensi budaya lokal tersebut dilakukan dengan dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang (Khutniah dan Iryanti, 2012), serta apresiasi kepada generasi muda yang mempelajari dan mempraktikannya (Fauzi, 2022).

Namun, upaya pewarisan di era modern mengalami hambatan akibat globalisasi yang menghadirkan kontradiksi antara tradisi dan



modernitas, global dan lokal, kelanggengan dan pembaharuan, komunitas dan individualitas (Irianto, 2017). Terjadi pergeseran kesenian tradisional yang bernuansa kolektif, spiritual, dan simbolik menjadi karya seni yang bersifat individual dan material yang berorientasi kebutuhan praktis ekonomi (Martono et. al., 2017). Perubahan sosial akibat industrialisasi dan sistem ekonomi pasar, serta globalisasi informasi mengakibatkan kesenian tradisional mulai bergeser ke arah kesenian yang berdimensi komersial (Mastra, 2021; Sujarno et al., 2003).

Di Bali, Prof. Dr. Made Bandem di tahun 1971 merumuskan klasifikasi kesenian bertajuk 'Wali, Bebali dan Bali-Balihan'. Wali merupakan seni sakral, atau diperuntukkan pada dewa-dewi dan arwah nenek moyang. Bebali adalah pertunjukan ritual untuk manusia, dalam upacara/ritual adat masyarakat. Balih-balihan adalah pertunjukan seni untuk hiburan (Irianto, 2016; Erawati, 2019).

Kesenian tradisional juga menghadapi tantangan dengan semakin banyaknya alternatif kesenian modern yang bercirikan budaya pop yang dianggap lebih menarik (Surahman 2016; Solehah et. al, 2022). Hadirnya karya seni kontemporer seperti budaya pop dan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi (bisnis) semata menjadikan kesenian rakyat semakin tertekan (Surahman, 2016).

Perkembangan pariwisata telah mengubah arena budaya menjadi arena ekonomi, dimana kreativitas seni termasuk seni budaya sakral diperjualbelikan, ditirukan, dimanipulasi, dan dipalsukan yang dikenal dengan *pseudo traditional art* (Irianto, 2016; Erawati, 2019). Pertunjukan untuk keperluan pariwisata memiliki ciri-ciri tiruan dari aslinya; singkat atau padat atau bentuk mini; penuh variasi; meninggalkan nilai sakral, magis, dan simbolis ditanggalkan, serta murah (Soedarsono, 1999), yang kemudian disebut sebagai komodifikasi budaya (Irianto, 2016).

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa seni tradisional sebaiknya tidak statis dan terkungkung oleh larangan-larangan tradisional yang menghambat eksistensi seni. Cohen berpendapat bahwa pandangan statis merupakan warisan keserjanaan Belanda yang cenderung melihat seni pertunjukan Indonesia dengan asumsi kepastian dan ketaatan pada aturan-aturan yang tidak dapat

diganggu gugat, sehingga memunculkan pendapat bahwa munculnya seni pertunjukan sebagai hiburan sebagai sebuah penyimpangan dan kemerosotan (Santosa et. al., 2013).

Di tengah dinamika globalisasi tersebut, pada akhirnya melahirkan perubahan fungsi, adaptasi, dan transformasi kesenian pertunjukan tradisional. Kesenian dapat terus eksis dan terus berinovasi karena mereka didukung oleh masyarakat, sebagai contoh kesenian soreng di Kabupaten Magelang (Fitiriasari, 2019). Kajian Wadiyo et. al., (2012) juga menunjukkan bahwa Manthous mampu membangun kembali kecintaan masyarakat terhadap musik gamelan melalui perpaduan gamelan dengan musik populer yang disebut Campursari. Pemanfaatan teknologi informasi dan ruang publik media sosial membantu pementasan seni tradisional dengan bentuk lebih menarik, lebih kaya dalam kreasi, dan mengikuti situasi perkembangan sosial (Surahman, 2016; Irhandayaningsih, 2018; Mastra et. al., 2021; Waluyo dan Rosmawati, 2021).

Perkembangan pariwisata juga memunculkan kreativitas seni sebagai konsumsi wisata, membebaskan seniman berkreativitas untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan juga keberlangsungan ekonomi pelakunya (Erawati, 2019). Kesenian dan kebudayaan dikelola dengan baik selain menjadi potensi pariwisata, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya (Hasanah, 2015; Surahman, 2016).

Selain adaptasi tersebut, kesenian akan eksis jika didukung oleh masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan Puguh dan Utama (2018) bahwa kelangsungan hidup kesenian ditopang oleh keberadaan sejumlah unsur, yaitu seniman yang kreatif, karya seni yang berkualitas, kritikus seni yang berbobot, dan masyarakat pendukung yang apresiatif. Menurut Fitiriasari (2019) trikotomi antara seniman, masyarakat penyangga, dan adat merupakan tiga pilar penyangga yang cukup efektif. Sinaga et. al., (2021) menambahkan pentingnya partisipasi tokoh masyarakat dan elemen birokrasi lokal sebagai fasilitator dalam pengenalan dan kesempatan berkesenian. Alternatif lain ditawarkan Surahman (2016), yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) seniman rakyat, mengembalikan



peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung.

Selain masyarakat pendukungnya, eksistensi kesenian tradisional juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana diungkapkan Puguh dan Utama (2018), bahwa pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai patron-seni dengan menyusun kebijakan budaya yang dapat menempatkan pengembangan kesenian tradisi dalam kerangka kebudayaan nasional, mensinergikan antara pemerintah dan pihak lain (masyarakat pendukung, lembaga kebudayaan, dan dunia usaha), serta upaya peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap budaya sendiri (Puguh dan Utama, 2018). Pemangku kepentingan bidang kebudayaan di pemerintah daerah harus jeli untuk mengetahui dan menggali potensi budaya yang ada di daerahnya serta diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkannya (Puslitjak, 2020). Pemerintah daerah atau pihak-pihak berwenang lainnya, seyogyanya memberikan apresiasi terhadap kesenian tradisional di masyarakat dalam bentuk pementasan, publikasi maupun media internet agar kesenian tersebut tetap terjaga eksistensinya (Khutniah dan Iryanti, 2012). Tantangan di berbagai daerah saat ini adalah pelestarian budaya masih identik dengan intervensi anggaran mengingat komponen anggaran merupakan salah satu unsur utama untuk terlaksananya interaksi budaya (Sri Widari, 2020; Sulastri, 2020; Syahputra, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, eksistensi kesenian tradisional berkaitan dengan dukungan para pihak dan tersedianya ruang ekspresi, dimana juga dapat berdampak pada ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu (Brown, 2012; Smith, 2010; Irianto, 2016; Monika et al, 2024) menyebutkan pentingnya ruang ekspresi budaya terhadap eksistensi budaya dan bahkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian Bappeda Kota Surakarta (2021) dan BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) menyebutkan bahwa penyelenggaraan seni pertunjukan memberi dampak terhadap kelompok pelaku seni, kelompok penunjang seni pertunjukan, dan kelompok penunjang lainnya. Beberapa penelitian lainnya (Solehudin et.al, 2023; Kabnani et. al., 2024; Hermawati dan Milawaty, 2016; Setiyorini dan Mukti, 2017) juga menyatakan

bahwa seni pertunjukan telah memberi dampak secara ekonomi.

Di sisi lain, saat ini ruang publik sebagai ekspresi dinilai belum optimal (Kompas, 2024). Data Indeks Pemajuan Kebudayaan Jawa Tengah pada 2022 menunjukkan bahwa hanya sebesar 1,61% penduduk di Jawa Tengah yang terlibat sebagai pelaku atau pendukung dalam pertunjukan seni.

Eksistensi kesenian tradisional dalam kondisi termarginalisasi karena dianggap kurang memenuhi tuntutan standar industri pariwisata yang merupakan dampak utama dari globalisasi (Irianto, 2017). Untuk dapat hidup, kesenian tradisional dihadapkan pada pilihan mengikuti selera pasar yang dapat berdampak ekonomi tetapi kehilangan nilai, atau pilihan nilai kebudayaan dipertahankan tetapi tidak mendapatkan ruang, atau pilihan di antara keduanya (Erawati, 2019; Irianto, 2017). Kesenian tradisional telah dijadikan benda budaya yang diproduksi oleh suatu industri secara massal demi keuntungan secara finansial. Kesenian tradisional yang semula sebagai subjek pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya, kemudian berubah menjadi objek berupa benda yang harus diperjualbelikan melalui proses produksi budaya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, terlihat adanya urgensi analisis mengenai peranan ruang ekspresi budaya dalam konteks eksistensi seni pertunjukan tradisional di tengah pilihan nilai seni dan modernitas. Naskah ini diharapkan dapat memberikan masukan rekomendasi strategi kebijakan dalam penyediaan ruang ekspresi untuk mendukung eksistensi seni pertunjukan tradisional di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

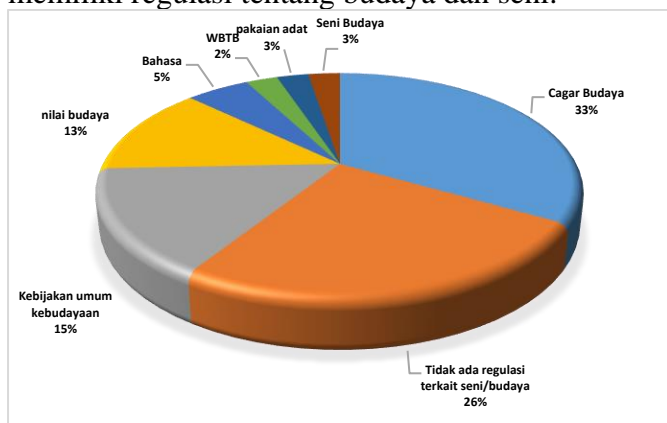
Kebijakan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan daerah, dimana tugas yang diamanatkan kepada pemerintah daerah antara lain menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan atas ekspresi budaya. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan diantaranya pusat kebudayaan, taman budaya, ruang pertunjukan, gelanggang/gedung budaya. Pemajuan kebudayaan



juga dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat, festival, pesta budaya, pertunjukan, penyajian, pameran, penayangan, lomba dan kegiatan lainnya.

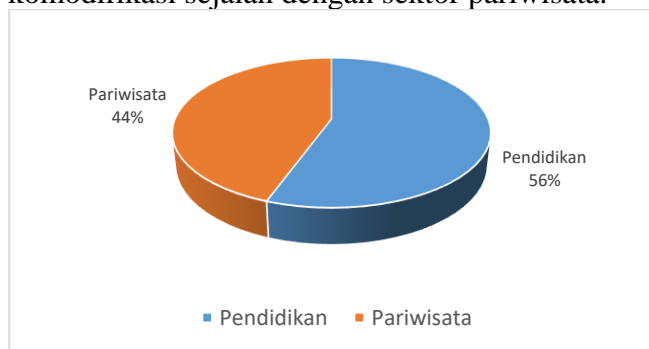
Regulasi di tingkat kabupaten/kota cukup beragam, sebagian daerah (22) menetapkan peraturan daerah dan 4 daerah menetapkan peraturan kepala daerah terkait budaya. Sepertiga daerah mengatur tentang cagar budaya, sebagian lainnya terkait dengan kebijakan pemajuan secara umum, nilai budaya. Sebanyak 9 daerah tidak memiliki regulasi tentang budaya dan seni.



Gambar 1 Regulasi tentang Seni Budaya di Jawa Tengah

Sumber: data diolah (2024)

Perumpungan kebudayaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pariwisata (Sebagian dengan pemuda dan olahraga). Perumpungan dengan pendidikan sedikit lebih banyak dibanding pariwisata. Perumpungan tersebut paling tidak menunjukkan arah kebijakan fokus kebudayaan apakah lebih dititikberatkan pada Pendidikan, atau komodifikasi sejalan dengan sektor pariwisata.



Gambar 2. Perumpungan Urusan Kebudayaan pada Kab/Kota di Jawa Tengah

Sumber: data diolah (2024)

Merujuk Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebudayaan merupakan “Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”. Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara pariwisata merupakan urusan pilihan. Kedua pilihan tersebut menunjukkan arah kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan termasuk di dalamnya kesenian pada fokus pendidikan atau perekonomian. Namun, penempatan tersebut tidak berdiri sendiri. Alokasi sumber daya menjadi faktor lain yang sangat berpengaruh. Misalnya, Kota Surakarta menempatkan kebudayaan dengan pariwisata dan memiliki komitmen alokasi sumber daya yang tinggi sebagai bagian dari sektor unggulan daerah. Di Kabupaten Kebumen, kebudayaan juga ditempatkan beriringan dengan Pariwisata, tetapi dukungan sumber daya relatif terbatas. Kabupaten Pati mendudukkan kebudayaan dengan pendidikan dengan alokasi sumber daya yang sangat terbatas dibanding Pendidikan. Selain dari aspek kebijakan dan kelembagaan, dukungan sumber daya menjadi faktor penting dalam penyediaan ruang bagi bertumbuhnya kesenian tradisional. Namun, di banyak daerah, alokasi sumber daya, terutama anggaran, SDM dan sarana relatif lebih rendah dibanding urusan wajib lainnya.

Selain itu, fokus di dalam urusan kebudayaan, sebagian urusan masih lebih banyak berfokus pada pemeliharaan peninggalan berupa artefak. Sebagai contoh, beberapa regulasi dan program mengarah pada pemeliharaan cagar budaya, terutama benda fisik dan Sebagian mencatatkan warisan tak benda (WBTB). Di sisi lain upaya pemajuan kebudayaan agar sesuai dengan konteks saat ini masih kurang dilakukan. Upaya revitalisasi kebudayaan terutama kesenian masih kurang dilakukan oleh beberapa daerah.

Masalah lain adalah bahwa sumber daya pemerintah daerah sebagai pengampu kebudayaan terutama kesenian tradisional masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, aparat pengampu urusan kebudayaan seringkali bukan ahli dibidangnya. Hal ini menambah masalah pada upaya pemajuan kebudayaan yang kurang tepat sesuai kebutuhannya.

Kondisi seni pertunjukan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (2024),



terdapat 203 jenis kesenian yang terdata dan diusulkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di tahun 2024. Sebanyak 159 kesenian telah tercatat, 49 kesenian telah ditetapkan sebagai WBTB, serta 2 kesenian yang diakui oleh ICH UNESCO yang menunjukkan pengakuan internasional atas kekayaan budaya di Jawa Tengah. Pada Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) dari tahun 2021 – 2024, terdaftar 83 kesenian tradisional dari Jawa Tengah. Berdasarkan data identifikasi kajian BRIDA Jawa Tengah (2024) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terdapat 27 daerah yang mengirimkan data dimana didapatkan jumlah pelaku seni sebanyak 5.232 orang atau kelompok. Kota Surakarta menjadi pusat utama dengan 42 jenis kesenian. Keberadaan fasilitas dan infrastruktur budaya yang memadai di Surakarta mendukung konsentrasi kesenian ini, sehingga kota ini menjadi destinasi budaya yang strategis.

Di wilayah Surakarta, Pati, dan Banyumas, seni pertunjukan tradisional wayang kulit, tari topeng, dan kuda lumping tetap menjadi daya tarik utama yang menghubungkan masyarakat dengan akar budaya mereka. Seni-seni ini tidak hanya dipertahankan melalui pertunjukan rutin, tetapi juga mampu bertahan karena adanya sanggar dan lembaga pendidikan yang mengajarkan seni budaya ini.

Namun, di sisi lain kesenian rakyat yang tumbuh tersebut, menghadapi keterbatasan ruang tampil: misalnya, kesenian kuda lumping yang memiliki banyak kelompok, tetapi minim kesempatan untuk pentas. Oleh karena itu, upaya memperbanyak ruang ekspresi, baik melalui gedung seni, kegiatan budaya, maupun media lain menjadi kunci untuk menjaga keberadaan seni tradisional sebagai identitas budaya yang hidup.

Keberadaan Pelaku Seni

Keberadaan pelaku seni tradisional sangat bergantung pada ruang ekspresi yang tersedia. Ruang ekspresi tidak hanya memberikan kesempatan tampil, tetapi juga menjadi wahana penting untuk mempertahankan pelakunya. Hasil survey BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan mayoritas responden (55,56% pelaku seni dan 48,57% masyarakat) menyatakan bahwa ruang pertunjukan seni tradisional sangat memengaruhi eksistensi pelaku seni. Kelompok seni profesional dan komunitas sama-sama

membutuhkan ruang untuk berkarya. Bagi kelompok profesional, ruang ini mendukung keberlanjutan seni sebagai sumber penghidupan.

Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan seni cukup berpengaruh terhadap keberadaan pelaku seni. Lembaga non-formal seperti sanggar cukup banyak ditemukan di hampir semua daerah. Di sisi lain keberadaan sekolah formal (SMK Seni Budaya) masih terbatas, hanya ada di 22,22% kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki SMK seni. Meskipun demikian, seni tradisional sudah mulai diperkenalkan melalui ekstrakurikuler di sekolah (69,44% kabupaten/kota) dan melalui muatan lokal (77,78% kabupaten/kota).

Pelaku seni di berbagai wilayah terus berupaya menghidupkan seni tradisional meskipun menghadapi tantangan keterbatasan ruang ekspresi. Di Kota Surakarta, jumlah pelaku seni yang aktif cukup tinggi, baik dari kelompok profesional maupun komunitas. Wilayah Pati, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas juga menunjukkan munculnya berbagai komunitas seni lokal. Meskipun demikian, diperlukan langkah yang lebih strategis untuk memastikan pemerataan kesempatan tampil bagi semua pelaku seni (termasuk seniman disabilitas) sehingga potensi seni tradisional dapat terus dikembangkan dan diwariskan ke generasi mendatang.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024, menekankan pengembangan talenta nasional di bidang seni budaya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan jumlah, kualitas, dan rekognisi internasional pelaku seni, termasuk penyelenggaraan ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia.

Potensi ruang ekspresi

Ruang ekspresi budaya menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga keberadaan seni tersebut. Hasil survei BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan keberadaan ruang pertunjukan berperan erat dalam mendukung pelestarian seni. Mayoritas responden (58,33% pemerintah dan 62,86% masyarakat) menyatakan setuju bahwa ruang ekspresi telah berdampak besar terhadap kelestarian seni. Selain itu, 51,43% responden masyarakat dan 44,44% responden pemerintah mengakui pentingnya ruang ekspresi di tingkat daerah, tetapi infrastruktur seni di beberapa



daerah masih belum merata. Seni tradisional yang mendapatkan ruang untuk tampil, baik di acara adat seperti bersih desa maupun di hajatan masyarakat, memiliki peluang lebih besar untuk tetap eksis. Sebaliknya, kesenian yang tidak memiliki ruang ekspresi atau jarang ditampilkan, seperti beberapa kesenian lokal atau pertunjukan keraton (seperti Wayang Wong), beresiko mengalami kepunahan.

Ruang ekspresi budaya di Jawa Tengah berupa ruang fisik tercatat 66 ruang dan ruang nonfisik tercatat sejumlah 184 kegiatan. Kabupaten/kota dengan ruang ekspresi budaya fisik adalah Surakarta dan Pemalang, yang menunjukkan salah satu komitmen terhadap pelestarian dan penyediaan ruang bagi kegiatan budaya lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki ruang ekspresi budaya yang bisa dimanfaatkan untuk berkesenian antara lain di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) yang terletak di Kota Surakarta. Dalam setahun TBJT menampilkan 220 pertunjukan dari 35 kabupaten/kota, serta menyediakan anggaran pementasan wayang orang setiap 35 hari sekali (selapan) bergiliran perwakilan dari setiap kabupaten/kota. TBJT juga menyelenggarakan pameran budaya dan pasar raya yang bertujuan mengedukasi dan mendekatkan seni budaya ke masyarakat sebagai bagian dari keseharian. Dengan adanya banyak ruang ekspresi yang berwujud fisik memberi tempat bagi pelaku/kelompok seni untuk berekspresi dan melestarikan seni tradisional.

Kabupaten/kota dengan ruang non-fisik terbanyak adalah Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus, mencerminkan budaya yang kaya dengan tradisi dan festival. Banyaknya kegiatan ini penting untuk merawat dan mempromosikan identitas budaya lokal, meskipun tanpa infrastruktur fisik yang ekstensif.

Pada tahun 2024, kalender event yang dirilis oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah mencatat 218 event seni dan budaya, terdiri atas 10 event unggulan, dan 12 event rutin dan 196 tanpa kategori khusus. Lima daerah dengan jumlah event terbanyak adalah Temanggung (26 event), Kota Surakarta (25 event), Pati (14 event), Rembang (12 event), dan Kudus (11 event). Tercatat wilayah dengan event terbatas (hanya 1 event), yakni Blora, Brebes, Jepara, Kota Tegal, dan Wonogiri. Kota

Surakarta memiliki agenda terbanyak dalam penyelenggaraan event ini.

Tabel.1 Event Seni Unggulan di Jawa Tengah

No	Nama event	Kab/Kota	Lokasi
1	Grebeg Sudiro	Kota Surakarta	Pasar Gedhe-Kota Surakarta
2	Solo Menari	Kota Surakarta	Kota Surakarta
3	Festival Gunung Slamet	Purbalingga	D'Las Serang, Kab. Purbalingga
4	Solo Keroncong Festival	Kota Surakarta	Pamedan Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta
5	Java Balloon Attraction	Wonosobo	Taman Rekreasi Kalianget, Kab. Wonosobo
6	Festival arak-arakan Cheng Ho	Kota Semarang	Klenteng Agung Sam Poo Kong, Kota Semarang
7	Dieng Culture Festival	Banjarnegara	Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara
8	Moro Borobudur	Magelang	Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang
9	Festival Kota Lama	Kota Surakarta	Kota Lama Semarang, Kota Semarang
10	International Mask Festival	Kota Surakarta	Pendopo Balaikota Surakarta, Kota Surakarta

Sumber: Dinporapar Prov. Jateng, 2024

Masing-masing *event* memiliki latar belakang dan tujuan untuk melestarikan budaya termasuk seni tradisional. Di luar itu, terdapat *event* yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh berbagai komunitas di semua wilayah di Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kudus tercatat melaksanakan paling banyak event pada tahun 2024 ini berdasarkan kalender event.

Keberadaan Penikmat Seni

Mayoritas responden survei menilai bahwa ruang pertunjukan seni tradisional memainkan peran penting dalam mempertahankan minat masyarakat terhadap seni tradisional. Sejumlah 42,22% responden dari pelaku seni dan 28,57% responden dari masyarakat menilai bahwa ruang pertunjukan mampu menarik minat dengan baik, meskipun 36,11% responden dari pemerintah menilai hal tersebut hanya dalam tataran cukup.

Hubungan antara ruang publik dan keberadaan penikmat seni sangat erat. Hal tersebut dinilai oleh mayoritas responden (44,44% pemerintah dan 37,14% masyarakat) dengan melaporkan dampak positifnya. Ketertarikan



masyarakat terlihat dari data, yakni 50% masyarakat memilih untuk menonton pertunjukan hingga selesai dan 23,53% masyarakat menonton lebih dari sembilan kali dalam setahun.

Dari hasil pendalaman data di berbagai wilayah Kota Surakarta, Pati, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas, masyarakat menunjukkan minat yang kuat terhadap seni tradisional. Banyaknya penonton yang menghadiri acara seni dan meningkatnya keterlibatan anak muda dalam kegiatan seni di daerah tersebut menjadi bukti bahwa seni tradisional masih relevan.

Media sosial dan inovasi pertunjukan seni menjadi daya tarik bagi penikmat seni khususnya untuk generasi muda. Dengan dukungan pemerintah, komunitas seni, dan masyarakat, seni tradisional memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui ruang ekspresi yang mampu menjangkau dan melibatkan masyarakat secara luas. Keberadaan penikmat seni tradisional sangat bergantung pada dukungan ruang ekspresi yang tersedia. Seni tradisional membutuhkan penonton sebagai pendukung utama agar tetap eksis di tengah persaingan dengan seni kontemporer yang dianggap lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Oleh karena itu, ruang pementasan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menyesuaikan dengan minat masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan autentisitas seni tradisional. Ruang yang inklusif, inovatif, dan berkualitas menjadi media penting untuk mempertahankan ketertarikan masyarakat terhadap seni tradisional.

Aksesibilitas

Data survey BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan mayoritas responden (44,44% pemerintah, 55,56% pelaku seni, dan 42,86% masyarakat) menilai aksesibilitas terhadap ruang ekspresi seni sangat penting. Namun, 31,11% pelaku seni menilai bahwa akses terhadap ruang ekspresi masih terbatas, terutama karena kendala jadwal dan prosedur penggunaan ruang. Pemerintah daerah telah menyusun rencana strategis untuk memperluas aksesibilitas seni tradisional, meskipun cakupannya masih dinilai cukup terbatas oleh mayoritas responden (44,44%).

Hasil pendalaman di Kota Surakarta, Pati, dan Wonosobo memiliki akses yang lebih baik

berkat ketersediaan ruang publik, meskipun beberapa fasilitas memerlukan izin atau biaya tertentu. Di Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas, keterbukaan akses masih terbatas, tetapi upaya peningkatan acara seni dan penyederhanaan perizinan telah menunjukkan perbaikan. Di beberapa daerah, tarif mulai diberlakukan setelah adanya konflik antara pengguna dan pengelola, atau penggunaan fasilitas yang tidak bertanggung jawab, sementara keringanan untuk seniman tersedia, tetapi prosedurnya dianggap memberatkan.

Ruang tidak berbayar cenderung kurang terkontrol yang menyebabkan masalah dalam pengelolaan dan tanggung jawab pengguna. Kesempatan yang sama terhadap seluruh pelaku seni dalam aksesibilitas ruang ekspresi. Optimalisasi aksesibilitas dan pengelolaan yang lebih baik diperlukan untuk mendukung keterbukaan ruang seni secara berkelanjutan.

Peran Aktor

Pada aspek keterlibatan aktor, data BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024) menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap pemerintah daerah paling besar perannya (77,78% pemerintah, 71,43% masyarakat), meskipun keterlibatan mereka sering dinilai cukup dan belum konsisten. Mayoritas responden (72,22% pemerintah, 55,56% pelaku seni, dan 54,29% masyarakat) menilai keterlibatan berbagai aktor dalam ruang ekspresi seni tradisional sangat penting. Pelaku seni dan masyarakat juga dinilai telah berperan aktif dalam mendukung seni tradisional, sementara lembaga swasta perannya masih minim.

Hasil pendalaman data pada beberapa wilayah karakter kebudayaan, di Kota Surakarta menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas seni, dan sektor pariwisata yang berhasil mendukung pertunjukan seni secara berkelanjutan. Wilayah lain, yakni Pati, Wonosobo, Banyumas, Pemalang, dan Banjarnegara juga menunjukkan keterlibatan aktor dengan dukungan pemerintah daerah, komunitas seni, dan pelaku usaha lokal. Koordinasi yang lebih baik antar-aktor diperlukan untuk memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan ruang ekspresi budaya.

Dampak Ekonomi



Keberadaan ruang ekspresi budaya memiliki dampak ekonomi dalam arti luas. Sesuai hasil survey BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2024), mayoritas responden (44,44% pemerintah, 46,67% pelaku seni, dan 48,57% masyarakat) menyatakan bahwa pentas seni tradisional memberikan kontribusi nyata terutama dalam mendukung usaha kecil dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, 41,67% responden dari pemerintah menilai pertunjukan seni tradisional berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi sektor lain. Dampak ekonomi setidaknya meliputi pendapatan pelaku seni, kesempatan berusaha, serta dampak ikutan bagi perekonomian lokal.

Sebagian responden pemerintah (50%) dan pelaku seni (36%) menyampaikan terjadi kenaikan pendapatan pelaku seni sebesar 15-30% dari penyelenggaraan ruang ekspresi budaya. Namun, saat ini pendapatan seniman belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Terdapat 56% pelaku seni yang melaporkan pendapatan mereka lebih besar sebelum pandemi terjadi. Sementara sektor pendukung seperti pedagang dan UMKM mencatat peningkatan hingga 30%. Wilayah seperti Kota Surakarta menunjukkan pendapatan yang lebih stabil karena dukungan pemerintah, sementara wilayah lain, yakni Pati dan Wonosobo masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan peluang ekonomi dari seni tradisional. Tantangan terbesar pada seniman non-profesional (seniman komunitas) yang kesulitan mengelola pementasan komersial akibat keterbatasan akses fasilitas dan biaya operasional. Pementasan seni tradisional yang non-komersial, seperti acara hari jadi dan upacara adat, sering kali didukung oleh pemerintah daerah dengan terbatas sebagai pengganti biaya transportasi. Di sisi lain, pementasan komunitas seperti *Merti Dusun* atau bersih desa melibatkan pengeluaran pribadi seniman dan sebagian pemerintah/masyarakat desa, justru memberikan dampak ekonomi positif pada pelaku usaha pendukung. Pementasan semi-komersial, seperti festival, mulai memberikan *bayaran* bagi seniman meskipun masih mengandalkan sponsor. Sementara itu, pementasan sepenuhnya komersial, seperti hajatan masyarakat, menghasilkan pendapatan langsung yang lebih besar bagi seniman dan sektor pendukung. Pendapatan seniman dari pementasan di tingkat komunitas masih rendah dan seniman tidak dapat sepenuhnya

mengandalkan seni sebagai sumber pendapatan utama.

Penyelenggaraan pementasan seni pertunjukan tradisional berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan minat untuk beraktivitas ekonomi di wilayah sekitar ruang ekspresi. Hasil survei menyebutkan dari kegiatan ini dapat menciptakan sekitar 6 hingga 8 jenis pekerjaan baru, seperti yang disampaikan oleh 44,44% responden pelaku seni dan 40% responden masyarakat. Selain itu, masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui peluang pekerjaan di sektor pendukung. Sebagian responden (38,89% pemerintah dan 40% masyarakat) menyatakan bahwa ruang ekspresi berdampak terhadap perekonomian lokal melalui peluang lapangan pekerjaan. Namun, minat investasi (dalam arti minat untuk beraktivitas ekonomi) di bidang seni tradisional masih terbatas: 36,11% pemerintah dan 24,44% pelaku seni menyatakan pengaruhnya kecil. Sebaliknya, 40% responden masyarakat melihat peluang yang cukup menjanjikan dengan kontribusi sekitar 5-15% dari pelaku usaha. Kota Surakarta, Pati, dan Wonosobo menunjukkan peluang ekonomi yang lebih besar melalui seni tradisional terutama berkat perkembangan sektor pariwisata dan industri kreatif. Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas, meskipun dalam skala yang lebih kecil, melalui festival seni dan kegiatan budaya lainnya dapat mengundang minat masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, optimalisasi peran seni tradisional dalam menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Keberadaan ruang ekspresi seni tradisional memberikan dampak ikutan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha pendukung seperti UMKM, pedagang, dan penyedia jasa. Dalam berbagai pertunjukan seni tradisional, aktivitas kerumunan yang terjadi mendorong transaksi ekonomi di sekitar lokasi acara. Hasil survei menunjukkan 47,22% responden pemerintah dan 45,71% responden masyarakat melaporkan dampak positif terhadap sektor jasa seperti wisata, kuliner, dan agen perjalanan. Mayoritas responden (61,11% pemerintah dan 60% masyarakat) menyampaikan pendapatan pelaku UMKM juga meningkat. Bahkan, seluruh responden dari penyelenggara



acara melaporkan peningkatan pendapatan pedagang atau UMKM hingga lebih dari 5%. Dampak ikutan di Kota Surakarta cukup besar karena acara seni di kota ini menarik banyak pedagang, penyedia jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya. Kabupaten Pati, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas juga merasakan manfaat serupa, meskipun skalanya lebih kecil. Di wilayah ini, tumbuh sektor UMKM, pedagang kaki lima, dan jasa pendukung acara seperti jasa transportasi, *make-up*, serta dekorasi. Tingginya minat masyarakat terhadap seni tradisional turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kesediaan mayoritas responden membayar lebih untuk tiket pertunjukan seni berkualitas. Ini menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal.

Analisis Strategi Penyediaan Ruang Ekspresi

Pada aspek ketersediaan, sebagian besar kabupaten memiliki sarana fisik tempat yang bisa digunakan untuk pertunjukan, hanya saja kondisinya berbeda-beda. Sebagian kecil daerah tidak memiliki tempat khusus untuk pertunjukan seni. Sebagian tempat tersebut masih layak digunakan, tetapi sebagian tidak layak, baik dari kualitas bangunan maupun aksesibilitasnya. Penyelenggaraan acara yang menampilkan kesenian tradisional ada di seluruh daerah, hanya saja kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Pada aspek keterlibatan, sebagian besar tempat adalah milik pemerintah daerah.

Ruang ekspresi berupa gedung banyak mengandalkan peran pemerintah, begitu juga dengan ruang ekspresi festival, banyak kegiatan dari pemerintah. Pementasan dalam berbagai acara juga banyak dari pemerintah serta lembaga lain seperti bisnis, BUMN/BUMD dan pusat perbelanjaan. Peran masyarakat adalah pementasan “tanggapan”, acara komunitas atau kelompok seperti “merti dusun”, dan hajatan. Selain itu, sanggar atau kelompok juga memiliki agenda pementasan sendiri dengan biaya sendiri. Setidaknya setahun sekali sanggar atau kelompok komunitas seni tersebut menyelenggarakan pementasan rutin.

Pada aspek aksesibilitas, terdapat beberapa kategori ruang ekspresi. Ada yang tidak berbayar, tetapi sulit diakses karena alur perizinan yang

menyebabkan masyarakat kelas bawah segan untuk mengaksesnya. Ada yang berbayar dengan harapan PAD, tetapi memberatkan seniman. Beberapa daerah mengalami tekanan untuk pemenuhan PAD termasuk dari ruang ekspresi. Meskipun untuk penekanan kesenian dengan memberikan keringanan sudah dilakukan, tetapi prosedur untuk memperoleh keringanan tersebut sering kali memberatkan dan berliku. Sementara itu, di daerah lain awalnya gratis, tetapi ketika terjadi konflik dan penggunaan tidak bertanggung jawab, kemudian dibatasi dengan penerapan tarif. Ruang pertunjukkan yang tidak berbayar berpotensi tidak terkontrol dan pengguna tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kondisi di atas, arah kebijakan penyediaan ruang ekspresi ini adalah:

1. mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan.
2. revitalisasi, inovasi, dan kreativitas kesenian
3. menggali sumber non APBD termasuk CSR atau hibah yang tidak mengikat.
4. pemanfaatan anggaran desa untuk menyediakan ruang ekspresi

Wajib bagi semua daerah untuk menyediakan sarana fisik pertunjukan atau ruang ekspresi budaya untuk pertunjukan kesenian tradisional sesuai dengan regulasi dapat berupa pusat Kebudayaan; taman budaya; ruang pertunjukan; taman kota; kebun raya sanggar; gelanggang/gedung budaya; atau tempat lain yang bisa dimanfaatkan. Tempat tersebut layak dan terpelihara dengan baik.

Setiap jenis kesenian memiliki karakter masing-masing, sehingga tempat dan waktu, serta *event* pertunjukan bisa berbeda-beda. Perlunya pendekatan terbuka, memandang bahwa semua tempat adalah ruang publik yang bisa digunakan untuk berekspresi, seperti pendopo kecamatan, kelurahan/desa, lapangan, halaman rumah, tempat parkir, bahkan tepi sungai dapat dimanfaatkan untuk pertunjukan.

Di setiap daerah setidaknya terdapat kegiatan pementasan yang memberikan kesempatan kepada semua pelaku seni untuk tampil. Setiap daerah juga harus memiliki media *broadcasting* dan media sosial sebagai media dokumentasi dan penayangan kesenian tradisional. Selain itu pemda memfasilitasi peningkatan



kapasitas *content creator* budaya khususnya seni pertunjukan tradisional.

Kegiatan lomba atau pekan seni seperti Porseni perlu dikembangkan kembali di setiap daerah, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi. Pendekatan terbuka, memandang bahwa semua tempat adalah ruang publik yang bisa digunakan untuk berekspresi, dengan demikian sangat memungkinkan ruang publik seperti pendopo kecamatan, kelurahan/desa, lapangan, halaman rumah, tempat parkir, bahkan tepi sungai dapat dimanfaatkan untuk pertunjukan.

Pemerintah daerah perlu menjamin semua kesenian memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ruang publik, tampil di ruang pertunjukan atau *event* budaya. Kebijakan berupa akses terbuka dan bertanggung jawab, pemanfaatan seluas-luasnya tempat publik termasuk taman kota, pendopo kecamatan atau desa/kelurahan, namun dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab, dengan aturan yang disepakati bersama. Dalam hal tempat atau ruang bertarif, perlu dibuatkan mekanisme yang lebih ringan bagi pementasan seni. Kebijakan perizinan dalam penggunaan ruang publik juga dipermudah. Harus dipastikan keterjangkauan tempat publik, baik bagi pelaku seni maupun penonton, misalnya dalam hal jarak, akses masuk, dan aspek teknis lainnya.

Analisis Peran Aktor

Peran pemerintah penting dalam membangun ekosistem pertunjukan memberikan fasilitas dan sarana penunjang pertunjukan yang memudahkan seniman. Di sisi lain perlu keseimbangan dengan non-pemerintah, terutama seniman karena jika terlalu besar, akan memanjakan seniman. Maka penting untuk memperbanyak ruang ekspresi yang tidak bergantung pada peran pemerintah (fasilitasi). Peran komunitas dan masyarakat penting untuk menciptakan pertunjukan yang berdampak pada pendapatan.

Peran seniman ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan pemerintah. Pelibatan diperluas dan merata tidak hanya pihak tertentu saja apalagi menimbulkan perpecahan. Pemberdayaan komunitas seni dalam penyelenggaraan acara Pemda dan Desa melalui kolaborasi dalam setiap *event* dan sebagian *event* diselenggarakan oleh seniman atau komunitas.

Pemerintah desa didorong untuk menyediakan atau membuka ruang pertunjukan di tempat publik baik pendopo balai desa, lapangan, rumah adat halaman rumah, atau ruang publik lainnya. Setiap desa minimal sekali dalam setahun memiliki kegiatan budaya yang mementaskan kesenian tradisional lokal.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dan insentif bagi pihak-pihak yang menginisiasi penggunaan tempat publik non-konvensional dalam berbagai jenis sebagai ruang pertunjukan. Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan insentif bagi masyarakat yang menyelenggarakan *event* yang menampilkan kesenian tradisional, baik berupa fasilitasi, kemudahan perizinan, sarana prasarana, dana, maupun dukungan lainnya. Selain itu juga disediakan fasilitas untuk pementasan keliling seperti mobil panggung pementasan untuk digunakan seniman berkeliling.

Upaya lain adalah meningkatkan minat masyarakat untuk menciptakan ruang ekspresi seni pertunjukan. Peran masyarakat perlu ditingkatkan sehingga tidak semua pertunjukan difasilitasi pemerintah. Sebagai contoh pementasan oleh komunitas di beberapa daerah misalnya kuda lumping atau tari topeng yang diinisiasi pemerintah daerah yang memberikan dampak ekonomi setidaknya untuk sektor riil.

Strategi Peningkatan Peran Ruang Ekspresi Budaya terhadap Eksistensi Seni Pertunjukan Tradisional

Semakin banyak ruang ekspresi berpotensi semakin mendorong munculnya banyak pelaku seni. Sebaliknya, eksistensi kesenian dan pelaku seni juga membutuhkan dukungan ruang ekspresi. Baik kelompok profesional maupun komunitas membutuhkan ruang pementasan agar tetap eksis. Kelompok profesional membutuhkan ruang ekspresi agar tetap bertahan karena seni bagi mereka menjadi sumber penghidupan. Kesenian masyarakat non-komersial tumbuh dan tetap ada selama masih dipentaskan.

Semua jenis seni tetap membutuhkan pementasan untuk tetap eksis, baik kesenian itu sendiri maupun pelaku seninya. Beberapa kesenian hampir punah karena tidak pernah ditampilkan. Sebaliknya, kesenian yang mendapatkan tempat di masyarakat sering ditampilkan maka akan tumbuh.



Di sisi lain ada jenis kesenian yang eksis dan masih banyak, tetapi ruang ekspresinya terbatas. Contoh kesenian rakyat seperti kuda lumping atau tari topeng banyak tumbuh bahkan mencapai ribuan, tetapi kesempatan untuk tampil lebih sedikit dari jumlah kelompok tersebut.

Kesenian sebagai perekat sosial dan dibutuhkan, salah satu wujudnya adalah tetap ditampilkan dalam acara atau diinisiasi oleh pendukungnya. Beberapa kesenian yang sudah tidak lagi dipentaskan akan tenggelam disertai dengan minimnya regenerasi. Karakteristik kesenian yang ditampilkan sebagian bersifat *market oriented* atau sosial.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pendukung seni adalah memperbanyak ruang ekspresi yang berkontribusi pada pelestarian. Ruang ekspresi yang memberikan kesempatan bagi semua kesenian, terutama kesenian yang hampir punah menjadi salah satu kunci pelestarian.

Berdasarkan realitas di lapangan, terdapat beberapa jenis karakter seni dengan media pentasian masing-masing. Sebagai contoh, wayang kulit lebih banyak dipentaskan di acara adat seperti “Merti Dusun”. Adapun kesenian kuda lumping lebih banyak dipentaskan di acara hajatan atau komunitas. Seni tari keraton dan kreasi yang berkembang di sanggar lebih banyak dipentaskan dalam acara dinas, pusat perbelanjaan, atau pembukaan acara lainnya.

Pelestarian juga membutuhkan regenerasi dan regenerasi membutuhkan penampilan. Contoh kesenian yang dipelajari di sanggar membutuhkan penampilan rutin, baik untuk naik jenjang maupun penampilan rutin.

Kesenian juga akan tetap eksis selama masih didukung oleh masyarakat pendukungnya. Jika kesenian tidak lagi didukung oleh masyarakat pendukungnya, dia akan punah. Penguatan dukungan masyarakat tentunya diperlukan media berupa ruang pentasian.

Selain itu, perlu pentasian atau penampilan kesenian perlu disesuaikan dengan perkembangan minat masyarakat saat ini tanpa menghilangkan jati diri seni itu. Penampilan tetap dilakukan secara berkualitas dan membawa pesan-pesan moral yang menjadi ciri khas kesenian tradisional.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat beberapa rumusan kebijakan yang bisa diusulkan, yaitu:

1. penyelenggaraan pentasian yang rutin untuk mencari bibit seniman.
2. pentasian bisa dalam bentuk pekan kesenian atau sejenisnya yang memungkinkan semua kesenian bisa terlibat;
3. kesenian yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda wajib diberikan perhatian dengan pentasian dan regenerasi;
4. kesenian rakyat yang sudah eksis dan berkembang didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda;
5. lomba pentas kesenian tradisional seperti lomba dalang cilik, lomba seni tari, kuda lumping, atau seperti “lengger idol” menjadi solusi bagi kesenian-kesenian tradisional agar dikenal dan berkembang.
6. pentasian khusus untuk seni yang hampir punah, terutama yang sudah terdaftar berkolaborasi antara pemda dan komunitas;
7. kombinasi pentasian seni yang sedang tumbuh dengan yang hampir punah, contoh pentasian kuda lumping didahului dengan lengger atau tari cepetan
8. ruang khusus untuk kesenian asli atau klasik yang tetap mempertahankan orisinalitas, serta ruang untuk ekspresi bagi kesenian kreasi atau yang disebut garapan.
9. pentasian di lembaga pendidikan dan sanggar bisa ditonton khalayak dan menggunakan ruang publik sehingga membantu memperkenalkan kesenian dan meningkatkan minat masyarakat terhadap seni.

Strategi Optimalisasi Dampak Ruang Ekspresi Budaya terhadap Ekonomi Masyarakat

Dalam konteks ekonomi makro, memang belum bisa mengidentifikasi langsung pengaruh pertunjukan seni tradisional terhadap PDRB sektor ekonomi kreatif. Pencatatan terhadap seni pertunjukan belum dilakukan dengan sistematis sehingga tidak tersedia atau yang relevan. Namun, pentasian seni dapat menghasilkan aktivitas kerumunan yang menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi. Namun, tidak semua pentasian tersebut berdampak pada perekonomian pelaku seni, bahkan kebanyakan tidak berdampak. Pihak yang



banyak mendapatkan manfaat justru para pedagang dan jasa lainnya.

Tidak semua pementasan mendatangkan pedagang seperti contoh wayang orang Sriwedari yang tidak mendatangkan pedagang dari luar saat pertunjukan rutin di dalam Gedung, sehingga diperlukan upaya agar ruang ekspresi atau pertunjukan yang tersedia berdampak ekonomi, baik bagi pelaku seni maupun usaha terkait lainnya. Di sisi lain ada pergesekan dengan kebijakan pemerintah daerah, dimana pemanfaatan ruang atau sarana pemerintah daerah dikenakan tarif, dan hal ini dapat menjadi beban bagi seniman. Bagi pemerintah daerah penarikan ini merupakan upaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Di sisi lain kesenian juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara luas. Jika negara stabil, kesenian akan berkembang. Sebagai contoh pada saat pandemi Covid kesenian sangat terpukul, sangat terasa guncangan pada kesenian.

Berdasarkan kondisi di lapangan terdapat beberapa jenis pementasan kesenian tradisional yang dapat dibedakan menjadi non-komersial, semi komersial, atau komersial. Pementasan non-komersial, misalnya disponsori oleh pemerintah daerah seperti acara adat/hari besar, hari jadi, atau acara lain yang dimaksudkan untuk memberikan ruang pementasan bagi seniman. Meskipun pemerintah daerah mengeluarkan *fee*, tetapi hanya sebagai pengganti transportasi bagi seniman. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembukaan acara pemda kerap mengundang seniman dengan tarif tertentu.

Pementasan non-komersial juga ditopang oleh masyarakat dan komunitas serta sanggar misalnya dalam *Merti Dusun*, pementasan rutin atau ulang tahun. Dalam pementasan tersebut, seniman dan masyarakat pendukungnya yang mengeluarkan dana untuk pentas termasuk sewa gedung, alat, kostum, dan lain sebagainya. Dalam pementasan non-komersial justru pihak lain seperti pedagang atau UMKM, jasa sewa dan jasa lainnya yang menerima keuntungan.

Pementasan semi komersial, misalnya dalam penyelenggaraan festival yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pementasan yang dilakukan menerima pembayaran dari penonton dan pementas mendapatkan bayaran dari panitia. Di luar itu dana penyelenggaraan masih didukung oleh sponsor. Pelaku seni tidak

mengeluarkan dana, bahkan mendapatkan *fee* meskipun tidak besar. Sebagian penyelenggara mendapatkan keuntungan dan sebagian tidak, namun pedagang, UMKM, dan jasa lainnya mendapatkan keuntungan dari pementasan ini.

Pementasan komersial dilakukan dalam bentuk pementasan berbayar. Penonton membayar untuk bisa menyaksikan pementasan dan dana tersebut masuk ke penyelenggara dan pelaku seni, namun hal ini sangat jarang. Wayang Orang Sriwedari tidak sepenuhnya komersial, karena biaya operasional ditanggung pemerintah daerah.

Pementasan yang sepenuhnya komersial bagi seniman terjadi pada saat warga masyarakat menyelenggarakan hajatan atau acara adat lainnya. Pelaku seni menetapkan tarif tertentu dan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan pelaku seni. Sebagaimana pementasan lainnya, pelaku usaha seperti pedagang, UMKM dan jasa pendukung yang justru menikmati keuntungan.

Dengan demikian, pementasan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha pendukung dan terkait seperti pedagang, UMKM dan jasa pendukungnya, meskipun tidak selalu memberikan dampak ekonomi langsung dan nyata bagi pelakunya. Seniman profesional melakukan pementasan karena diundang oleh pihak tertentu, baik masyarakat maupun komunitas. Namun, jarang bagi seniman terutama yang non-profesional untuk bisa mengelola pertunjukan dengan konsep komersial. Bagi seniman amatir atau komunitas, pementasan merupakan kebutuhan seniman dan mereka mengeluarkan dana untuk itu.

Sebagian komunitas berupaya memulai upaya komersialisasi pementasan, misalnya menyelenggarakan pertunjukan dengan berbayar dan pementas diberikan *fee* sesuai standar tarif yang berlaku. Namun, upaya tersebut terhalang ketersediaan sarana dan prasarana. Di sisi lain, akses terhadap sarana seperti gedung atau tempat pertunjukan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagian memerlukan biaya. Oleh karena itu, komunitas tersebut belum dapat tumbuh menjadi usaha seni yang menguntungkan.

Pementasan kesenian tradisional yang bersifat kolosal dengan banyak pemain di acara hajatan masyarakat menurun akibat hadirnya kesenian kontemporer yang lebih efisien. Pertimbangan biaya ditambah berkembangnya alternatif kesenian kontemporer mempengaruhi



minat masyarakat untuk “nanggap”. Penampilan kesenian komunitas di masyarakat kebanyakan kesenian dengan tarif murah yang kurang menguntungkan secara ekonomi bagi pelaku seni karena bagi mereka yang penting tampil. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ada beberapa rumusan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Pemda berkolaborasi dengan komunitas rutin menyelenggarakan pementasan yang membuka peluang bagi semua pelaku seni untuk tampil, serta usaha terkait untuk berpartisipasi.
2. pemerataan pementasan, misalnya di semua kecamatan atau bahkan desa, atau pementasan keliling agar semua wilayah tersentuh pementasan.
3. promosi dan edukasi kepada masyarakat terutama kalangan muda melalui berbagai media terutama media kontemporer untuk mengenal kesenian tradisional.
4. subsidi bagi pelaku seni yang bersedia tampil dalam pementasan non-komersial di berbagai acara.
5. Pemda berkolaborasi dengan *stakeholder* lain, memperbanyak pementasan, lomba, insentif, dan kegiatan sejenis yang memberikan kesempatan kepada seniman untuk berkreasi
6. latihan di sanggar atau kelompok seni sebaiknya bisa dipertontonkan kepada publik yang akan bisa menarik kerumunan hingga menghasilkan transaksi ekonomi
7. Himbauan agar dalam acara kedinasan menampilkan kesenian tradisional dan menyediakan pendanaannya.
8. memperbanyak media pementasan menggabungkan kesenian tradisional dengan kegiatan bisnis lainnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ada keberagaman kondisi ruang ekspresi budaya di Jawa Tengah, baik pada aspek komitmen pemerintah daerah, dukungan sumber daya, dan aspek ketersediaan ruang ekspresi. Keberagaman kondisi tersebut tercermin pada kondisi infrastruktur dan kebijakan di masing-masing daerah. Tantangan ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian kebudayaan. Adapun kondisi ruang ekspresi dari aspek

aksesibilitas seperti perizinan pentas sudah cukup memadai meskipun aksesibilitas ruang bagi seniman kalangan tertentu masih terbatas. Kondisi ruang ekspresi pada aspek keterlibatan aktor menunjukkan bahwa dukungan utama dalam penyelenggaraan ruang ekspresi berasal dari komunitas seni dan masyarakat serta pemerintah yang cenderung memosisikan sebagai fasilitator, sedangkan keterlibatan swasta masih terbatas.

Ruang ekspresi budaya berperan erat dengan eksistensi pertunjukan tradisional di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan seni, keberadaan pelaku seni, dan keberadaan penikmat seni di sekitar ruang ekspresi. Seni pertunjukan tradisional saat ini masih bertahan, tetapi beberapa seni lokal menghadapi risiko kepunahan karena minimnya regenerasi dan perhatian. Para pelaku seni dari sanggar, kelompok masyarakat, dan lembaga pendidikan terus berupaya melestarikan seni tradisi. Beberapa program pemerintah juga membantu regenerasi, tetapi terbatas dengan cakupan wilayah dan anggaran. Minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni tradisional mulai meningkat meskipun masih kalah saing dengan seni kontemporer. Media sosial dan inovasi dalam pengemasan seni menjadi daya tarik bagi penonton muda. Melalui penyelenggaraan festival dan acara budaya secara rutin, seni pertunjukan tradisional dapat terus dinikmati oleh publik dan dapat dilestarikan. Namun, keberlanjutan seni tradisional ini masih tergantung pada dukungan dari pemerintah dan komitmen masyarakat untuk menjaga keberadaan ruang ekspresi budaya.

Keberadaan ruang ekspresi budaya berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan penciptaan peluang lapangan kerja dan peningkatan minat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi di sekitar ruang ekspresi. Ruang ekspresi memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat khususnya pada ekonomi lokal di Jawa Tengah. Kegiatan festival budaya, pergelaran seni, dan pameran lokal menciptakan peluang ekonomi terutama bagi pelaku UMKM, pekerja seni, dan penyedia jasa. Aktivitas budaya ini menarik wisatawan yang bisa menggerakkan perdagangan lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat



meskipun belum cukup meningkatkan pendapatan seniman terutama seniman komunitas.

REFERENSI

- Bappeda Kota Surakarta. (2021). *Kajian Dampak Seni Pertunjukan terhadap Ekonomi Kota Surakarta*.
- Brandon, J. R. (1967). *Theatre in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Brown, R. (2012). *Artistic Development in Community Cultural Centers*. *Art & Society Review*.
- Djelantik, A. A. M. (1998). *Seni Pertunjukan Ritual dan Politik*. *Gelar: Jurnal Ilmu dan Seni STSI Surakarta*, 2(1), 9–19.
- Erawati, N. M. P. (2019). *Pariwisata dan Budaya Kreatif: Sebuah Studi Tentang Tari Kecak di Bali*. *KALANGWAN Jurnal Seni Pertunjukan*, 5(1), 1–6. <http://jurnal.isidps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/731>
- Fauzi, Y. N. (2022). *Strategi Apresiasi Dalam Pemajuan Kebudayaan Bidang Seni Dalam Dunia Pendidikan*. *PARAGUNA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Pemikiran, dan Kajian Seni Karawitan*, 9(2), 95–101.
- Fitiriasari, P. D. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Kesenian Soreng Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya (Studi Di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 409–420.
- Hermawati, S., & Milawaty, Y. (2016). *Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 21(3), 173–181.
- Hasanah, L. L. N. El. (2015). *Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Studi Pemuda*. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/36812>
- Irhandayaningsih, Ana. (2018). *Pelestarian Kesenian Tradisional sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal di Masyarakat Jurang Blimbing Tembalang*. *ANUVA*, 2(1): 19-27.
- Irianto, Agus Maladi. (2016). *Komodifikasi Budaya Di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah*. *Jurnal Theologia*, 27(1). 213-236.
- Irianto, Agus Maladi. (2017). *Kesenian Tradisional Sebagai Sarana Strategi Kebudayaan di Tengah Determinasi Teknologi Komunikasi*. *NUSA*, 12 (1).
- Kabnani, J. S., Bunga, A. O., Sheldena, D. N., & Laure, M. (2024). *Kajian Seni Pertunjukan Musik Tradisional Melalui Komunitas Musik terhadap Pengembangan Nilai Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua*. *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 2(2), 138–151.
- Kayam, U. (2000). *Pertunjukan Rakyat Tradisional Jawa dan Perubahan*. In S. Sairin & H. S. A. Putra (Eds.), *Ketika orang Jawa nyeni* (pp. 1–20). Yogyakarta: Galang Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021*.
- Khutniah, N., & Iryanti. V.E. (2012). *Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara*. *Jurnal Seni Tari*, 1(1) (2012)
- Martono, I., & Handoko, A. (2017). *Topeng Etnik Nusantara Dalam Perkembangan Budaya Global*. *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, 32, (1) 123-130
- Mastra, I.W., Adnyana, I.B.G.B., & Pancawati, L.P. (2021). *Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media terhadap Seni Budaya Indonesia*. *Widyadari*, 22(1), 182 – 194.
- Monika, A., Aidar, A., Anggreani, N., Sari, N. M., Munasril, M., Agustina, R., Farma, R., Herdah, S. A., & Sampena, I. D. (2024). *Penguatan Ekonomi dan Budaya Melalui Peran Festival Seni dalam Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Budaya di Kabupaten Aceh Singkil*. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN)*, 2(2), 1012–1018. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i2.2370>
- Murni, E.S., Rohidi, T.R., & Syarif, M.I. (2016). *Topeng Seni Barongan Di Kendayakan*



- Tegal: Ekspresi Simbolik Budaya Masyarakat Pesisiran. *Catharsis: Journal of Arts Education*, 5 (2).
- Puguh, D.R., & Utama, M.P. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Wayang Orang Panggung. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 133-153.
- Puguh, D. R. (25 Maret 2024). Kondisi Kebudayaan di Masyarakat dan Ruang Publik Dalam Ekosistem Kebudayaan Di Jawa Tengah. Materi disampaikan dalam kajian “Menghidupkan Ruang Ekspresi sebagai Strategi Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah”, diselenggarakan oleh Brides Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Puslitjak. (2020). Tata Kelola Kebudayaan dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan. *Risalah Kebijakan*. Pusat Penelitian Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Santosa, D.H., Haryono, T., & Soedarsono., R.M. (2013). Seni Dolalak Purworejo Jawa Tengah: Peran Perempuan dan Pengaruh Islam Dalam Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. *Kawistara*, 3(3), 227-334.
- Setiyorini, H. P. D., & Mukti, A. B. (2017). Seni Pertunjukan Wayang Orang Sebagai Daya Tarik Wisata Perkotaan - Tinjauan Konsep Experience Economy. *Proceeding SENDI_U*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5049>
- Sinaga, F.S.S, Winangsit, E., & Putra, A.D. (2021). Pendidikan, Seni, dan Budaya: Entitas Lokal dalam Peradaban Manusia Masa Kini. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, 4(2).
- Smith, J. (2010). Cultural Preservation Through Community Spaces. *Journal of Cultural Heritage*.
- Soedarsono, R. M. (2003). *Seni Pertunjukan Dari Perspektif Politik, Sosial, Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Solehah, S., Jamaludin. U., & Fitriyadi, D.S. (2022). Nilai-Nilai Budaya pada Kesenian Debus (Suatu Pendekatan Studi Etnografi Budaya Banten). *Journal of Civic Education*, 5(2), 212-222.
- Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2023). Pemanfaatan Tari Kecak Sebagai Ekonomi Kreatif untuk Peningkatan Perekonomian Daerah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/91>
- Sujarno, A. C., Munawaroh, S., & Suyami. (2003). *Seni Pertunjukan Tradisional: Nilai, Fungsi, dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kemenbudpar
- Sulastrri, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 13–27.
- Surahman, S. (2016). Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia. *Jurnal Rekam*, 12(1).
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2). <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Wadiyo, Wa, Timbul Haryono, R.M. Soedarsono, R.M. Soedarsono, Victor Ganap. 2012. *Campursari Karya Manthous: Kreativitas Industri Musik Jawa dalam Ruang Budaya Massa*. *Jurnal Seni Budaya*, Vol 22, No 4 (2012)
- Waluyo, Djoko, Rosmawati. 2021. *Dinamika Seni Tradisional Pada Era Digital Dynamics of Traditional Art in The Digital Age*. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* Vol. 2 No. 2 Desember 2021 Hal: 161 - 172
- Widari, Sri D. A. D. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoretis dan Empiris. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i1.12>
- Yuliza, F. (2020). Creativity of Art in Sendratari Ramayana as an Example of Transformation Process. *Jurnal Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 22 (2), 2580-2



